



2016

LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2016



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PARIAMAN**





BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Undang-undang dimaksud adalah undang-undang dimaksud adalah undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan diatas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan diatas.

Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 330 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka disusunlah peraturan daerah Kota Pariaman No.06 tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan diatas.

Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu pasal 150 peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 330 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka disusunlah peraturan



Walikota Pariaman nomor 15 tahun 2009 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai SAP sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan agar dapat digunakan untuk membandingkan realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ke-taatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaku Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- e. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- f. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- g. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011,
- i. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- j. Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah,
- k. Peraturan Daerah Kota Pariaman No.11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- l. Peraturan Walikota Pariaman No. 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Kali atas Peraturan Walikota Pariaman No. 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.
- m. Peraturan Walikota Pariaman No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman No. 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman



1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I :PENDAHULUAN

BAB II :PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD SERTAHAMBATAN/KENDALA DALAM PENCAPAIANNYA

1. Pencapaian Target Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD
2. Hambatan / Kendala dalam Pencapaian Target

BAB III :IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas Pelaporan yang Terkait dengan Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V :PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1.1 Belanja
2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 2.1 Aset
 - 2.2 Kewajiban
 - 2.3 Ekuitas Dana.
3. Laporan Operasional
 - 3.1 Pendapatan –LO
 - 3.2 Beban
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Pengungkapan Penting Lainnya
 - 5.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - 5.2. Rekening Pemerintah

BAB VI : PENUTUP



BAB II
PENCAPAIAN TARGET
PENDAPATAN DAN BELANJA
SKPD SERTA
HAMBATAN/KENDALA
DALAM PENCAPAIANNYA

BAB II

PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD SERTA HAMBATAN/KENDALA DALAM PENCAPAIANNYA

2.1 Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja SKPD

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kota Pariaman Tahun 2016 dan DPA Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariamanselaku SKPD memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran Belanja Bappeda Kota Pariaman tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah
2.	BELANJA	Rp 8.802.299.064,00
2.1.	- BELANJA OPERASI	Rp 8.510.837.314,00
2.1.1.	- Belanja Pegawai	Rp 5.349.887.714,00
2.1.2.	- Belanja Barang	Rp 3.160.949.600,00
2.2.	- BELANJA MODAL	Rp 291.461.750,00
2.2.2.	- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 291.461.750,00
2.2.5.	- Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp

Adapun realisasi keuangan serta pencapaian target pendapatan dan belanja SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Pariaman Tahun 2016

No.	Uraian	Realisasi Keuangan	Pencapaian Target
2.	BELANJA	Rp 7.977.063.607,00	90,62 %
1.1.	- BELANJA OPERASI	Rp 7.689.487.857,00	90,35 %
1.1.1.	- Belanja Pegawai	Rp 5.081.874.529,00	94,99 %
1.1.2.	- Belanja Barang	Rp 2.607.613.328,00	82,49 %
1.2.	- BELANJA MODAL	Rp 287.575.750,00	98,67 %
1.2.2.	- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 287.575.750,00	98,67 %
1.2.5.	- Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00	0,00 %

2.2 Hambatan / Kendala dalam Pencapaian Target



Realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp7.977.063.607,00 atau 90,62% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp8.802.299.064,00. Realisasi belanja operasi hanya sebesar Rp 7.689.487.857,00 atau 90,35% dari anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar Rp 8.510.837.314,00 sedangkan realisasi belanja modal hanya sebesar Rp287.575.750,00 atau 98,67% dari anggaran belanja modal yang ditetapkan sebesar Rp 291.461.750,00.

Realisasi belanja operasi sebesar 90,35% di pengaruhi oleh belanja pegawai yang mencapai 94,99% dan Belanja barang dan jasa yang hanya mencapai 82,49 % dan rendahnya realisasi pada jenis belanja barang yang hanya mencapai 82,49%, yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada penyediaan belanja Bahan pakai habis 5,41 %, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12,83 %, belanja cetak dan pengadaan 17,29% belanja makanan dan minuman 24,14 % dan belanja perjalanan dinas 26,27%.

Hambatan / kendala dalam pencapaian target pendapatan tersebut adalah :

- 1) Rendahnya realisasi belanja barang (yang hanya mencapai 82,49%) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Penganggaran yang terlalu besar pada setiap anggaran belanja barang
 - b. Adanya Efisiensi yang dilakukan pada setiap item belanja barang



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN
KINERJA KEUANGAN SKPD



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan tahun 2016 yang dibiayai dengan dana APBD Kota Pariaman tahun 2016 merupakan realisasi atas Rencana Kinerja Tahun Kedua dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman periode tahun 2014 - 2018 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1 Tujuan

- a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai visi dan misi
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pekerjaan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan.
- d. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kawasan sesuai kondisi dan potensi kawasan
- e. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan tahunan, lima tahunan dan jangka panjang.
- f. Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan
- g. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksana pembangunan
- h. Meningkatkan efektifitas monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan
- i. Meningkatkan kajian dan pengembangan
- j. Meningkatkan system informasi pengelolaan data dan informasi pembangunan

3.2 Sasaran

- a. Tersedianya sarana penunjang yang memadai 80% dari kebutuhan ;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 75% ;
- c. Meningkatkan kawasan perkotaan ;
- d. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur kota ;
- e. Terkelolanya sistem perencanaan pembangunan ;
- f. Terbinanya system monitoring, evaluasi untuk publikasi informasi dan hasil pembangunan ;



- g. Termanfaatnya secara optimal website untuk publikasi informasi dan hasil pembangunan ;
- h. Termanfaatkannya IPTEK untuk pengumpulan, publikasi data informasi ;
- i. Meningkatnya pengkajian dan penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan
- j. Meningkatnya pengembangan system informasi dan strategik .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dalam DPABadan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 telah ditetapkan rencana kinerja keuangan yang mencakup 13 program dan 52 kegiatan. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 11 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 442.760.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 412.960.945,00 atau 93,27 %. Pada pelaksanaan program ini, beberapa indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan pada pelaksanaan program ini terdapat 1 indikator kinerja keluaran (output) yang tidak mencapai target sebanyak 2 kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik realisasi keuangan sebesar 25,95 % hal ini disebabkan karena penganggaran awal disediakan belanja pembayaran listrik dan telepon ternyata dalam tahun berjalan hanya belanja telepon yang bisa dibayarkan sedangkan untuk belanja listrik telah dibayarkan oleh Kantor DPPKA Kota Pariaman (Kantoe Bappeda dan Kantor DPPKA mempunyai 1 rekening listrik).
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional realisasi keuangan 55,24 % hal ini disebabkan karena adanya pelelangan kendaraan dinas operasional Bappeda dalam tahun 2016 sehingga kendaraan tersebut tidak perlu dibayarkan pajaknya.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.

Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyediaan jasa surat-menyurat	1	1	Tahun	4.000.000	3.987.500	99,69
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	Bulan	16.500.000	4.282.254	25,95
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	1	Tahun	5.700.000	3.148.400	55,24
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1	1	Tahun	169.012.500	166.912.500	98,76
5	Penyediaan alat tulis kantor	1	1	Tahun	29.000.000	29.000.000	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	1	Tahun	19.087.500	19.085.000	99,99
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1	1	Tahun	7.500.000	7.489.000	99,85
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	Tahun	10.000.000	10.000.000	100,00
9	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	1	Tahun	36.960.000	36.666.500	99,21
10	Penyediaan makanan dan minuman	1	1	Tahun	15.000.000	12.175.000	81,17
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	Tahun	130.000.000	120.214.791	92,47
J u m l a h					442.760.000	412.960.945	93,27

3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 401.600.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.301.765.198,00 atau 75,14%.

Pada pelaksanaan program ini, satu indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Yaitu:

1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional realisasi keuangan sebesar 42,89 % hal ini disebabkan karena adanya 1(satu) unit kendaraan yang dilelang dan efisiensi anggaran, baik dalam hal belanja BBM maupun service atau penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional.
2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor realisasi keuangan sebesar 39,57 % hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran dan sifat anggaran ini menyediakan tergantung ada atau tidaknya kerusakan dari perlengkapan yang ada.



Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	jenis	215.500.000	210.264.000	97,57
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	1	1	tahun	127.000.000	54.473.698	42,89
3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor	1	1	tahun	11.500.000	4.550.000	39,57
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor				42.350.000	28.559.500	67,44
4	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1	1	tahun	5.250.000	3.918.000	74,63
Jumlah					401.600.000	301.765.198	75,14

3.3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.13.000.000,00 atau 43,33%. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Besarnya realisasi keuangan 43,33% hal ini disebabkan karena kurang adanya pegawai yang menjalankan pendidikan dan pelatihan formal terkait izin dari pimpinan yang disebabkan pelatihan yang ada bertepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga lebih di lakukan kegiatan yang ada.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2	1	kali	30.000.000	13.000.000	43,33
Jumlah					30.000.000	13.000.000	43,33

3.3.4 Program Peningkatan/Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp25.280.000,00 atau 84,27 %.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan/Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Program Peningkatan/Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	4	4	dok	30.000.000	25.280.000	84,27
Jumlah					30.000.000	25.280.000	84,27

3.3.5 Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 504.600.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 458.926.388,00 atau 90,95 %.

Pada pelaksanaan program ini tidak terdapat indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyusunan data dan informasi pembangunan dan profile daerah			dok	116.800.000	111.933.650	95,83
2	Forum Data SKPD			dok	178.500.000	177.202.425	99,27
3	Pengembangan Database Sarana Prasarana (Peta Digital)			dok	161.300.000	127.539.300	79,07
4	Pengumpulan dan Publikasi Daerah Kota Pariaman			dok	48.000.000	42.251.013	88,02
Jumlah					504.600.000	458.926.388	90,95

3.3.6 Program Pengembangan Perumahan

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 159.100.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 131.389.100,00 atau 82,58%. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja atas Program Pengembangan Pemanfaatan ruang dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6

Indikator Kinerja Program Pemanfaatan ruang

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Fasilitas penyediaan dan pengembangan perumahan di kota pariaman	4	4	kali	159.100.000	131.389.100	82,58
Jumlah					159.100.000	131.389.100	82,58

3.3.7 Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp285.450.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 250.667.128,00 atau 87,81%. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan. Besarnya

realisasi keuangan 87,81 % hal ini disebabkan sangat kurangnya pengurusan izin pemamfaatan ruang sesuai RTRW pada tahun 2016

Pencapaian kinerja atas Program Pengembangan Pemanfaatan ruang dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Program Pemanfaatan ruang

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	4	4	kali	285.450.000	250.667.128	87,81
Jumlah					285.450.000	250.667.128	87,81

3.3.8 Program Pemamfaatan Ruang

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 205.061.750,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 153.451.140,00 atau 74,83%. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan. Besarnya realisasi keuangan 74,83 % hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran.

Pencapaian kinerja atas Program Pengembangan Pemanfaatan ruang dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Program Pemanfaatan ruang

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	4	4	kali	205.061.750	153.451.140	74,83
Jumlah					205.061.750	153.451.140	74,83

3.3.9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.768.350.000,00. Dari total jumlah anggaran tersebut, dapat direalisasikan

sebesar Rp. 553.701.393,00 atau 72,06%. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target

Pada pelaksanaan program ini, satu indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Yaitu:

1. Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga realisasi keuangan sebesar 33,78 % hal ini disebabkan karena tidak jadinya pemerintah Pusat melaksanakan peng-updatetan data AMPL berbasis Rumah Tangga sementara dan data pusat ini berkaitan dengan Data AMPL berbasis Rumah Tangga di Kota Pariaman akibatnya secara otomatis kegiatan pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga di Kota Pariaman tidak dapat dilaksanakan secara utuh hanya sebagian kecil dari seluruh tahapan pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			Desa	50.150.000	37.148.593	74,07
2	Sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Berbasis Geospasial	20	1	Org	340.650.000	298.638.100	87,67
	Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	3		Dok	234.000.000	169.423.300	72,40
3	Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga	3	3	Kec	143.550.000	48.491.400	33,78
Jumlah					768.350.000	553.701.393	72,06

3.3.10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.556.870.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 1.489.444.163,00 atau 95,67 %. Pada pelaksanaan program ini, semua indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.10
Indikator Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyusunan rancangan RKPD			dok	206.500.000	201.459.600	97,56
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Dok	210.610.000	207.708.750	98,62
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			dok	31.000.000	23.375.000	75,40
4	Penyusunan rancangan PPAS			dok	209.700.000	207.066.000	98,74
5	Penyusunan rancangan PPAS Perubahan			dok	204.000.000	199.951.000	98,02
6	Penyusunan rancangan KUA			dok	199.000.000	198.341.000	99,67
7	Penyusunan Rancangan KUA Perubahan			Dok	193.500.000	179.430.000	92,73
8	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan			Dok	125.000.000	116.120.000	92,90
9	Evaluasi RKPD Kota Pariaman			Dok	177.560.000	155.992.813	87,85
Jumlah					1.556.870.000	1.489.444.163	95,67

3.3.11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.375.419.600,00. Dari total jumlah anggaran tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp.318.918.842,00 atau 84,95%. Pada pelaksanaan program ini, satu indikator kinerja keluaran (output) kegiatan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pada pelaksanaan program ini terdapat indikator kinerja keluaran (output) yang tidak mencapai target sebanyak 1 kegiatan, yaitu

1. Kegiatan pendampingan BDC dengan realisasi keuangan 50,99% disebabkan tidak jadinya dilaksanakan Workshop sehingga belanja untuk transportasi peserta, makanan dan minuman kegiatan dan honorarium narasumber tidak direalisasikan. Kondisi ini terjadi karena kegiatan ini ada di APBD Perubahan tahun 2016 yang menyebabkan waktu tidak cukup untuk melaksanakan Workshop tersebut.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11

Indikator Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi			SKPD	196.225.000	179.527.172	91,49
2	Pendampingan P2KP			Dok	93.520.000	80.732.270	86,33
3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian GIS			Desa/ke	47.374.600	39.129.400	82,60
4	Pendampingan BDC			Dok	38.300.000	19.530.000	50,99
Jumlah					375.419.600	318.918.842	84,95

3.3.12 Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.872.202.000,00. Dari total jumlah anggaran tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp.793.035.887,00 atau 90,92%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Perencanaan Sosial Budaya dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12

Indikator Kinerja Program Program Perencanaan Sosial Budaya

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	1	1	tahun	226.000.000	218.236.467	96,56
2	koordinasi perencanaan pembangunan dekonsentrasi & tugas perbantuan	4	4	dok	158.300.000	151.760.200	95,87
3	koordinasi perencanaan penggulungan kemiskinan daerah	1	1	tahun	148.700.000	130.140.170	87,52
4	Koordinasi Strategi pencegahan dan pembahasan korupsi pemerintah daerah	4	4	dok	160.402.000	125.674.900	78,35
5	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKP Desa	1	1	dok	178.800.000	167.224.150	93,53
Jumlah					872.202.000	793.035.887	90,92

3.3.13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.100.250.000,00. Dari total jumlah anggaran tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp.1.045.553.894,00 atau 95,03%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh



indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel 3.12.dibawah ini.

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Databse Perumahan dan Kawasan Pemukiman Berbasis Geospasial				421.250.000	415.537.400	98,64
	Operasioanal pokjanis rencana kawasan pemukiman kumuh				145.000.000	132.888.220	91,65
	Koordinasi perencanaan bidang fisik				196.000.000	176.373.021	89,99
2	koordinasi Perencanaan Pembangunan DAK				338.000.000	320.755.253	94,90
Jumlah					1.100.250.000	1.045.553.894	95,03



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Walikota Pariaman No. 21 Tahun 2010.

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Bappeda Kota Pariaman sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Pariaman merupakan entitas pelaporan dari unit pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menjalankan tugas dan fungsi atas pengelolaan, pengendalian serta penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga memenuhi asumsi kemandirian dan kesinambungan entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, yang memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Sebagai entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Kebijakan Akuntansi yang Diperlukan untuk Memahami Laporan Keuangan

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

- ❖ Laporan Realisasi Anggaran SKPD mencakup pos-pos pendapatan, belanja dan surplus atau defisit.
- ❖ Dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD, jenis pendapatan adalah pendapatan asli daerah berupa pendapatan retribusi daerah, sedangkan jenis belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.

1) Akuntansi Anggaran

- Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian oleh manajemen, yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan dan belanja.
- Akuntansi anggaran SKPD diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran SKPD yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
- Anggaran pendapatan SKPD meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.



- Anggaran belanja SKPD terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).
- Akuntansi anggaran SKPD diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

2) Akuntansi Pendapatan

- Pendapatan SKPD diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Akuntansi pendapatan SKPD dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan di-bukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama, sedangkan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3) Akuntansi Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mem-punyai fungsi perbendaharaan.
- Belanja operasi SKPD adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah pada SKPD yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal SKPD adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
- 4) Akuntansi Surplus / Defisit
- Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - Selisih lebih / kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus / Defisit.
- ❖ Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - ❖ Transaksi pendapatan dan belanja dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

4.4.2 Neraca

- ❖ Neraca SKPD menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (akhir tahun anggaran).
- ❖ Setiap entitas pelaporan (SKPD) mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- ❖ Setiap entitas pelaporan (SKPD) mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan



jumlah-jumlah yang di-harapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

❖ Neraca SKPD mencantumkan pos-pos sebagai berikut :

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- c) Persediaan
- d) Aset Tetap
- e) Kewajiban Jangka Pendek
- f) Ekuitas Dana

1) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, ter-masuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena atasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
 - (a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual
 - (b) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan
 - (c) berupa kas dan setara kas
- Aset lancar pada Neraca SKPD meliputi kas dan setara kas, piutang, dan per-sediaan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan men-cakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti kom-ponen bekas.
- Kas dicatat sebesar nilai nominal.



- Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya.
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan.
- Persediaan dicatat sebesar :
 - (a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Nonlancar

- Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos asset nonlancar yang disajikan di neraca.

Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap terdiri dari: i). tanah, ii) peralatan dan mesin, iii) gedung dan bangunan, iv) jalan, irigasi dan jaringan, v) konstruksi dalam pengerjaan.
- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang



nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
 - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
 - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Biaya perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dikapitalisasikan minimal bernilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

sedangkan berupa gedung dan bangunan minimal bernilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2) Kewajiban

- ❖ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
- Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) **Ekuitas Dana**

- ❖ Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- ❖ Komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Ekuitas Dana Lancar

- Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan tahun 2016 ditutup dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 7.977.063.607,00 atau 90,62% dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 8.802.299.064,00

Rincian atas jumlah anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2016 tersebut disajikan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
2.	BELANJA	8.802.299.064,00	7.977.063.607,00	90,62 %
1.1.	BELANJA OPERASI	8.510.837.314,00	7.689.487.857,00	90,35 %
1.1.1.	Belanja Pegawai	5.349.887.714,00	5.081.874.529,00	94,99 %
1.1.2.	Belanja Barang	3.160.949.600,00	2.607.613.328,00	82,49 %
1.2.	BELANJA MODAL	291.461.750,00	287.575.750,00	98,67 %
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	291.461.750,00	287.575.750,00	98,67 %
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00 %

jumlah realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp 7.977.063.607,00 jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja tahun 2015 yaitu sebesar Rp 6.877.158.964,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.099.904.643,00 atau 15,99%.

Rincian atas jumlah realisasi pendapatan dan belanja tahun 2016 dan 2015 tersebut disajikan pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 dan 2015

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
2.	BELANJA	7.977.063.607,00	6.877.158.964,00	15,99 %
1.1.	BELANJA OPERASI	7.689.487.857,00	6.654.261.964,00	15,56 %
1.1.1.	Belanja Pegawai	5.081.874.529,00	4.371.196.194,00	16,26 %
1.1.2.	Belanja Barang	2.607.613.328,00	2.283.065.770,00	14,22 %
1.2.	BELANJA MODAL	287.575.750,00	222.897.000,00	29,02 %
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	287.575.750,00	222.897.000,00	29,02 %
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00 %



5.1.1 BELANJA

5.1.1.1 Belanja Operasi

Jumlah realisasi belanja operasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 7.689.487.857,00. Jumlah tersebut hanya mencapai 90,35% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.510.837.314,00. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja operasi tahun 2015 sebesar Rp. 6.654.261.964,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.035.225.893,00 atau 15,56%.

1. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.081.874.529,00 atau 94,99 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.349.887.714,00. Jumlah anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2016 dapat dirinci per jenis belanja pegawai bersangkutan, sebagaimana disajikan pada tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
1.	BELANJA PEGAWAI	5.349.887.714,00	5.087.529.529,00	95,10 %
	Belanja Tidak Langsung	2.070.635.714,00	2.028.969.529,00	97,99 %
	a. Gaji dan Tunjangan	1.753.886.714,00	1.722.612.529,00	98,22 %
	b. Tambahan Penghasilan PNS	316.749.000,00	306.357.000,00	96,72 %
2.	Belanja Langsung	3.279.252.000,00	3.058.560.000,00	93,27 %
	a. Honorarium PNS	3.273.252.000,00	3.052.905.000,00	93,27 %
	b. Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00 %
	b. Uang Lembur	6.000.000,00	5.655.000,00	94,25 %

Pencapaian target belanja pegawai tahun 2016 dari masing-masing jenis belanja pegawai tersebut dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Realisasi belanja gaji dan tunjangan hanya mencapai 98,22 % dari anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena besarnya jumlah anggaran pada penganggaran awal.
- Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS hanya mencapai 96,72 % dari anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena besarnya jumlah anggaran pada penganggaran awal.
- Realisasi belanja Honorarium PNS hanya mencapai 93,27 % dari anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena jumlah besarnya sudah ditetapkan oleh perwako. Sedangkan di waktu penganggaran belum ada ketetapannya di Perwako

Tabel 5.4
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
1.	BELANJA PEGAWAI	5.308.221.529,00	4.371.196.194,00	21,44 %
	Belanja Tidak Langsung	2.028.969.529,00	1.975.753.194,00	2,69 %
	a. Gaji dan Tunjangan	1.722.612.529,00	1.640.546.194,00	5,00 %
	b. Tambahan Penghasilan PNS	306.357.000,00	335.207.000,00	(8,61) %
2.	Belanja Langsung	3.279.252.000,00	2.395.443.000,00	36,90 %
	a. Honorarium PNS	3.273.252.000,00	2.308.833.000,00	41,77 %
	b. Honorarium Non PNS	0,00	81.810.000,00	(100,00) %
	c. Uang Lembur	6.000.000,00	4.800.000,00	25,00 %

Naiknyajumlah realisasi belanja pegawai tahun 2016 terhadap jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2015 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Realisasi belanja gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar 5,00%, hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai yang naik menjadi golongan IV dan adanya mutasi pegawai yang terjadi pada tahun 2016
- Realisasi belanja Tambahan penghasilan PNS mengalami penurunan sebesar 8,61%, hal tersebut disebabkan karena terjadinya mutasi [pegawai yang menyebabkan kurangnya pengeluaran dikarenakan golongannya lebih rendah dari pada yang lalu.
- Realisasi belanja Honorarium PNS mengalami kenaikan sebesar 41,77 %, hal tersebut disebabkan karena bertambahnya kegiatan yang



menganggarkan belanja langsung berupa honorarium PNS pada tahun 2016.

- Realisasi belanja Honorarium non PNStahun 2016 tidak dianggarkan karena tidak ada kegiatan yang harus membayarkan honorarium non PNS pada tahun 2016.
- Realisasi belanja Uang Lembur mengalami kenaikan sebesar 25,00%, hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jam lembur pada tahun 2016.

2. Belanja Barang

Jumlah realisasi belanja barang tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.607.613.328,00 atau 65,41 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.160.949.600,00. Jumlah anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2016 dapat dirinci per jenis belanja barang bersangkutan, sebagaimana disajikan pada tabel 5.5 dibawah ini

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2016
(Rincian Per Jenis Belanja Barang)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
	BELANJA BARANG	3.160.949.600,00	2.067.613.328,00	65,41%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	351.054.600,00	278.691.346,00	79,39%
2	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	2.350.000,00	57,32%
3	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	6.682.254,00	35,36%
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.800.000,00	64.707.452,00	69,73%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.225.000,00	304.572.000,00	92,79%
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/ Parkir	6.400.000,00	3.500.000,00	54,69%
7	Belanja Makan dan Minuman	346.510.000,00	321.267.700,00	92,72%
8	Belanja Perjalanan Dinas	1.115.850.000,00	886.594.076,00	79,45%
9	Belanja kursus, pelatihan, sosialisai dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	13.000.000,00	43,33%
10	Belanja Jasa Konsultasi	24.000.000,00	23.320.000,00	97,17%
11	Belanja Jasa Pihak ketiga lainnya	843.110.000,00	792.928.500,00	94,05%



dari 11 jenis belanja terdapat 6 jenis belanja yang capaian targetnya masih rendah. Pencapaian target belanja barang tahun 2016 dari masing-masing jenis belanja barang tersebut dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran yang terlalu besar
2. Efisiensi anggaran
3. Sudah tersedianya/terfasilitasinya ruang/gedung pertemuan
4. Tidak adanya izin dari atasan.

Jika jumlah realisasi belanja barang tahun 2016 sebesar Rp 2.067.613.328,00, dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja barang pada tahun 2015 sebesar Rp 2.283.065.770,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp 215.452.442,00 atau 9%. Perbandingan tersebut dapat dirinci per jenis belanja barang bersangkutan, sebagaimana disajikan pada tabel 11 dibawah ini.

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015
(Rincian Per Jenis Belanja)

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
	BELANJA BARANG	2.697.614.427,00	2.283.065.770,00	18,16 %
1	Belanja Bahan Pakai Habis	278.691.346	294.627.017,00	(5,41) %
2	Belanja Bahan / Material	2.350.000	5.615.000,00	(58,15) %
3	Belanja Jasa Kantor	6.682.254	13.063.912,00	(48,85) %
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.707.452	74.227.944,00	(12,83) %
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.572.000	368.261.100,00	(17,29) %
6	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.500.000	15.000.000,00	(76,67) %
7	Belanja Makanan dan Minuman	321.267.700	258.800.000,00	24,14 %
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	44.979.000,00	(100,00) %
9	Belanja Perjalanan Dinas	886.595.076	702.131.797,00	26,27 %
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.000.000	8.000.000,00	62,50 %
11	Belanja Pemeliharaan	-	2.275.000,00	(100,00) %
12	Belanja Jasa Konsultansi	23.320.000	346.535.000,00	(93,27) %
13	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	792.928.599	149.550.000,00	430,21 %

Kenaikan / penurunan jumlah realisasi belanja barang tahun 2016 terhadap jumlah realisasi belanja barang tahun 2015 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :



1. Kenaikan jumlah relisasi pada Belanja Makanan dan minuman, Belanja perjalanan dinas, Belanja kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS karenanya meningkatnya kebutuhan di tahun 2016.
2. Penurunan jumlah realisasi belanja Bahan Pakai Habis, bahan Material, Belanja jasa kantor, Belanja Perawatan kendaraan bermotor, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja sewa rumah/ gedung/gudang/parkir, Belanja Pakaian dinas dan atributnya, Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa konsultasi di sebabkan oleh kurangnya penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belanja serta efisiensi anggaran.

Dari jumlah realisasi belanja barang tahun 2016 sebesar Rp2.067.613.328,00 tidak terdapat belanja barang yang memenuhi ketentuan untuk dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca sesuai kebijakan akuntansi.

5.1.1.2 Belanja Modal

Jumlah realisasi belanja modal pada Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 287.575.750,00. Jumlah tersebut hanya mencapai 98,67 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 291.461.750,00. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja modal tahun 2015 sebesar Rp222.897.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 64.678.750,00 atau 29.02%.

1) Belanja Tanah

Pada tahun anggaran 2016 dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunan tidak terdapat anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi belanja modal - peralatan dan mesin pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 287.575.750,00 atau 98,67% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 291.461.750,00.

Belanja Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kebijakan Akuntansi untuk Dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca



Dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp287.575.750,00terdapat realisasi belanja modal yang memenuhi ketentuan untuk dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca sesuai kebijakan akuntansi.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun anggaran 2016 dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunantidak terdapat anggaran belanja modal untuk pengadaan gedung dan bangunan.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 2016 dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunantidak terdapat anggaran belanja modal untuk pengadaan jalan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada tahun anggaran 2016 dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunan tidak terdapat anggaran belanja modal untuk belanja modal pada Aset Tetap Lainnya tahun 2016

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

5.2.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016adalah sebesar Rp11.450.400,00 Saldo tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 7.511.540,00dengan rincian sebagai berikut :

(1) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 0.- dan Rp.0- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan pajak-pajak (PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 5.7
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Tahun 2016	Tahun 2015
	Kas	Rp -	Rp -
	-	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -

(2) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp11.450.400,00 dan Rp7.511.540,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (Supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	2016	2015
1	ATK	Rp 11.450.400	Rp 7.511.540
	Jumlah	Rp 11.450.400	Rp 7.511.540

Dengan rincian persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

Saldo 31 desember 2015	Rp 7.511.540
Penambahan	
- Pembelian	Rp 281.041.346
Pengurangan	
- Beban Pengurangan	Rp 277.102.486
Saldo 31 desember 2015	Rp 11.450.400

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

5.2.1.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.491.970.196,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 129.233.859,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.362.297.305,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 10

Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2016 dan 2015

Dalam Rupiah

No.	Uraian	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan / (Penurunan)
1	Peralatan dan Mesin	1.978.097.502,00	1.720.501.752,00	257.595.750,00
2	Gedung dan Bangunan	2.995.414.000,00	2.811.103.000,00	184.311.000,00
3	Jalan, jaringan dan Instalasi	121.409.500,00	121.409.500,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	481.514.100,00	481.514.100,00	0,00
5	Penyusutan	(2.084.464.906,00)	(1.772.231.047,00)	(312.233.859,00)
Jumlah		3.491.970.196,00	3.362.297.305,00	129.672.891,00

(1) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin **Error! Not a valid link.** **Error! Not a valid link.** per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.978.097.502 dan Rp. 1.720.501.752,00

Tabel 5.11

Kenaikan nilai peralatan dan mesin

Saldo per 31 Desember 2015	Rp1.720.501.752,00
Mutasi tambah:	
- Belanja Modal	Rp287.575.750,00
- hibah	Rp0,00
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp0,00
Mutasi kurang:	
- Mutasi ke aset lain	
- Mutasi (-) < 300.000	Rp29.980.000,00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp1.978.097.502,00

Pada mutasi tambah terdapat belanja modal sebesar Rp. 287.575.750,00 yang merupakan pembelian berupa

Tabel 5.12

Rincian Mutasi tambah 2016

No	Uraian	Harga
1	Belanja Modal pengadaan alat kantor	79.970.000,00
2	Belanja Modal pengadaan Alat Rumah Tangga	9.345.000,00
3	Belanja Modal pengadaan Komputer	103.800.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	74.460.750,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.000.000,00
Jumlah		287.575.750,00

Pada mutasi kurang terdapat mutasi (-) < 300.000 sebesar Rp. 29.980.000,00

(2) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp2.995.414.000,00 dan Rp. 2.811.103.000,00 mengalami mutasi tambah pada Antar SKPD sebesar Rp. 184.311.000,00 pada tahun berjalan sehingga terjadi kenaikan

Tabel 5.13

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan

Saldo per 31 Desember 2015	Rp2.811.103.000,00
Mutasi Tambah	
- Antar SKPD	Rp 184.311.000,00
- Reklasifikasi aset	Rp 0,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi aset	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp2.995.414.000,00

(3) Jalan, irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp121.409.500,00 dan Rp121.409.500,00. Tidak mengalami mutasi tambah atau pun kurang pada tahun berjalan.

Tabel 5.14

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2016

Saldo per 31 Desember 2015	Rp121.409.500,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	Rp 0,00
- Mutasi antar SKPD	Rp 0,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi aset	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp121.409.500,00

(4) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp 481.514.100,00 dan Rp 481.514.100,00. Tidak mengalami mutasi tambah atau pun mutasi kurang pada tahun berjalan.

Tabel 5.15

Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2016

Saldo per 31 Desember 2015	Rp481.514.100,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	Rp 0,00
- Reklasifikasi aset	Rp 0,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi aset	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp481.514.100,00

(5) Penyusutan

Penyusutan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.2.084.464.906,00 dan Rp.1.772.231.047,00 sehingga terdapat penurunan penyusutan sebesar Rp.312.233.859,00. jumlah tersebut merupakan saldo akumulasi penyusutan aset tetap dengan rincian

Akumulasi penyusutan per 31 desember 2016 terdiri dari

- Saldo awal	:	1.772.231.047,00
- Mutasi Tambah	:	312.233.859,00
- Mutasi Kurang	:	0,00
JUMLAH	:	<u>2.084.464.906,00</u>

(6) Aset Lain lain

Akumulasi penyusutan Aset lain-lain per 31 desember 2016 sebesar Rp. 48.118.000,00. Jumlah tersebut merupakan saldo akumulasi penyusutan aset lain-lainnya dengan rincian

Tabel 5.16

Mutasi Aset lain- Lainnya per tanggal 31 Desember 2016

Saldo	Rp. 628.199.477,00
Mutasi Tambah	
Peralatan dan mesin	Rp. 29.980.000,00
Mutasi Kurang	
Barang Rusak	Rp. 610.061.477,00
Saldo Akhir 31 Desember 2016	Rp. 48.118.000,00

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pada 31 Desember



2016 Kewajiban Jangka Pendek Badan Perencanaan Pembangunan daerah pada kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah sebesar Rp. 8.161.374.607,00 .

1. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari Aset atas Utang. Ekuitas Dana dikelompokkan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

Nilai Ekuitas Dana Badan Perencanaan Pembangunan 31 Desember 2016 berjumlah Rp -2.084.464.906,00 jika dibandingkan dengan tahun 2015 Ekuitas Dana bertambah sebesar Rp -1.772.231.047 terdiri dari penambahan surplus/defisit LO Rp. – 8.802.299.064,00

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

Perkiraan	2016
Pendapatan Retribusi Daerah	,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2016.

Tidak ada perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb.:

Tabel 5.17

tabel jumlah pendapatan-LRA dg Pendapatan-LO

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.3.2. BEBAN



Beban Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2016 sebesar Rp 8.098.577.568,00.

5.3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai - LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.18

Tabel Beban Operasi

No.	Uraian	31-Dec-16 Rp	31-Dec-15 Rp	Bertambah / (Berkurang) Rp
1	Beban Pegawai - LO	5.081.874.529.00	4.371.196.194.00	710.678.335.00
2	Beban Barang dan Jasa	2.603.674.468.00	0.00	2.603.674.468.00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	413.028.433.00	407.118.562.00	5.909.871.00
	Jumlah	8.098.577.430.00	4.778.314.756.00	3.320.262.674.00

5.3.2.1.1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai–LO sebesar Rp5.081.874.529,00 merupakan Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19

Tabel beban pegawai

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	Rp1.722.612.529,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	Rp306.357.000,00
3	Beban Uang Lembur – LO	Rp 5.655.000,00
4	Beban Honorarium PNS – LO	Rp 3.047.250,00
	Jumlah Keseluruhan	Rp5.081.874.529,00

5.3.2.1.2. Beban Barang

Beban Barang sebesar Rp2.603.674.468,00 merupakan Belanja Barang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20

Tabel Beban Barang

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Bahan Pakai Habis	274.752.486,00
2	BebanPersediaan Bahan/Material	2.350.000,00



3	Beban Jasa Kantor	6.682.254,00
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	64.707.452,00
5	Beban Cetak dan Penggandaan	304.572.000,00
6	Beban Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/ Parkir	3.500.000,00
7	Beban Makan dan Minuman	231.267.700,00
8	Beban Perjalanan Dinas	886.594.076,00
9	Beban Jasa Konsultasi	23.320.000,00
10	Beban kursus, pelatihan, sosialisai dan bimbingan teknis PNS	13.000.000,00
11	Beban Honorarium Non Pegawai	745.278.500,00
12	Beban Jasa Pihak ketiga – LO	47.650.000,00
	Jumlah	2.603.674.468,00

Tabel diatas dapat dirincikan oleh tabel berikut

Tabel 5.21
Tabel rincian beban barang

No	Uraian	Debet
1	Beban persediaan alat tulis kantor	209.257.340,00
2	Beban persediaan alat listrik dan elektronik	7.489.000,00
3	Beban persediaan peranko,materai dan benda pos lainnya	3.987.500,00
4	Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.076.500,00
5	Beban persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	29.942.146,00
6	Beban Peralatan Rumah Tangga habis pakai	10.000.000,00
7	Beban Bahan promosi	2.350.000,00
8	Beban jasa telpon	4.282.254,00
9	Beban Jasa dekorasi	2.400.000,00
10	Beban Jasa servis	61.559.052,00
11	Beban Surat tanda nomor kendaraan	3.148.400,00
12	Beban Cetak	134.143.500,00
13	Beban Penggandaan	170.428.500,00
14	Beban sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00
15	Beban sewa ruang rapat/Pertemuan	2.000.000,00
16	Beban Makan dan minum rapat	99.666.000,00
17	Beban makan dan minum kegiatan	131.601.700,00
18	Beban Perjalanan dinas dalam daerah	350.761.000,00
19	Beban perjalanan dinas luar daerah	535.833.076,00
20	Belanja Jasa konsultasi Perencanaan LO	23.320.000,00
21	Beban kursus kursus singkat /Pelatih LO	5.000.000,00
22	Beban bimbingan teknis	8.000.000,00
23	Beban honorarium tenaga ahli/Narasumber/instruktur	221.700.000,00
24	Beban Jasa pelaksanaan kegiatan	115.000.000,00
25	Beban Jasa Pengolahan Data	408.578.500,00
26	Belanja jasa transportasi dan akomodasi –LO	25.750.000,00
27	Beban Jasa tenaga kontrak	21.900.000,00
	Jumlah	2.603.674.468,00

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi



Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 413.028.433,00 merupakan Belanja Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.22
Tabel beban penyusutan dan amortisasi

No	Uraian	Jumlah
	Beban Penyusutan Aset Tetap	413.028.433,00
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	269.583.083,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.396.508,00
3	Beban Penyusutan Jalan irigasi jaringan	15.048.842,00
	Beban Penyusutan Aset yang direklasifikasika ke aset lainnya	0,00
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
2	Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	0,00
	Jumlah Keseluruhan	413.028.433,00

5.3.3. Beban Defisit Non Operasional

Beban Defisit Non Operasional sebesar Rp 0,00

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

Ekuitas Akhir sebesar Rp3.450.743.884,00 adalah saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Pariaman per 31 Desember 2016.

Rincian Perubahan Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Pariaman Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 5.24
Tabel perubahan ekuitas

Uraian	31-Des-16 Rp	31-Des-15 Rp
Ekuitas Awal	3.998.008.322,00	2.789.852.931,61
Surplus/Defisit - LO	(8.708.638.907,00)	(7.066.753.013,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	0,00	0,00
-Koreksi Ekuitas Lainnya	100.794.574,00	1.276.339.939,39
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	8.161.374.607,00	6.998.568.464,00
Ekuitas Akhir	3.551.538.596,00	3.998.008.322,00



5.5 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah Yang Digunakan

Bank : Bank Nagari Cab.Pariaman

No Rekening : 0500.0101.00430-1

Atas nama : Bendahara Pengeluaran Bappeda



BAB VI
PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu peningkatan kinerja khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman dapat dicapai seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana yang lengkap.

Disisi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman dapat melaksanakannya dengan secara efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan keuangan tahun 2016 ini, mengacu pada undang-undang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Penggunaan sistim ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Hal ini telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Diharapkan semua pihak yang berkepentingan umumnya, pada PPKD Kota Pariaman khususnya dapat mempergunakannya untuk bahan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam pembuatan laporan keuangan ini, mungkin tidak sempurna yang diharapkan, karena disana sini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun untuk masa yang akan datang akan kami usahakan lebih baik dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Semoga dengan dibuatnya Laporan Keuangan ini, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Pariaman, Maret 2017
Kepala Bappeda Kota Pariaman

Fadli,SH.M.Hum

NIP.19621211 198903 1 007